Efektivitas Pengadilan Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Finna Rosalina¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Kampar, Riau-Indonesia
Email: 12120324193@students.uin-suska.ac.id

ABSTRACT

This article discusses business disputes through litigation. Litigation is the process of resolving disputes through court. Choosing the right resolution path is very important to resolve business disputes well without causing excessive harm to either party. This research uses a library study approach, namely a research method that relies on books and other library sources as the main material and data. The research results explain that resolving business disputes through court is a method that is often used when the parties involved cannot reach an agreement through negotiation or mediation. Once the judge makes a final decision, the losing party must comply with the decision. This is a formal way to resolve disputes, and the process can involve various stages such as the presentation of evidence, a court hearing, and a judge's assessment. The District Court is part of the justice system which has the duty and authority to handle criminal and civil cases at the first instance. The Commercial Court is a special type of court which is also within the general court environment. The Commercial Court has special duties and authorities related to bankruptcy cases and payment delays.

Keywords: Disputes, Business, Non-Litigation Settlement, Litigation, Mediation, Negotiation

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang sengketa bisnis melalui jalur litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Memilih jalur penyelesaian yang tepat sangat penting untuk mengatasi sengketa bisnis dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kepustakaan, yaitu metode penelitian yang mengandalkan buku-buku dan sumber kepustakaan lainnya sebagai bahan dan data utama. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan adalah cara yang sering digunakan ketika pihak-pihak yang terlibat tidak bisa mencapai kesepakatan melalui negosiasi atau mediasi. Setelah hakim membuat keputusan akhir, pihak yang kalah harus mematuhi keputusan tersebut. Ini adalah cara yang resmi untuk menyelesaikan sengketa, dan prosesnya bisa melibatkan berbagai tahapan seperti penyampaian bukti, pendengaran persidangan, dan penilaian hakim. Pengadilan Negeri adalah bagian dari sistem peradilan yang memiliki tugas dan wewenang untuk menangani kasus-kasus pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan Niaga adalah jenis pengadilan khusus yang juga berada dalam lingkungan pengadilan umum. Pengadilan Niaga memiliki tugas dan wewenang khusus yang terkait dengan kasus kepailitan dan penundaan pembayaran.

Kata kunci: Sengketa, Bisnis, Penyelesaian, Non-Litigasi, Litigasi, Mediasi, Negosiasi

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kompleks telah mendorong berbagai jenis kerjasama bisnis. Meningkatnya aktivitas bisnis ini tak pelak memicu munculnya sengketa bisnis, yaitu konflik atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama bisnis. Sengketa bisnis dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pelanggaran kontrak, ketidakpatuhan, atau persaingan yang tidak sehat. Sengketa bisnis tidak hanya merugikan pihak yang terlibat, tetapi juga dapat berdampak pada reputasi dan keberlanjutan bisnis kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebab, jenis, dan penyelesaian sengketa bisnis agar dapat dihindari atau diselesaikan dengan tepat.

Karena aktivitas bisnis semakin meningkat, konflik antara pihak-pihak yang terlibat tidak dapat dihindari. Dalam sebuah perusahaan, konflik atau masalah yang muncul bisa menjadi sengketa bisnis jika melibatkan pihak lain atau perusahaan lain. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi perusahaan. Misalnya, jika dua perusahaan berbeda memiliki masalah terkait kontrak kerjasama, maka hal ini bisa berujung pada sengketa hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Sengketa bisnis seringkali muncul karena berbagai alasan dan masalah yang melatar belakngnya. Salah satu alasan utama adalah adanya *conflict of interest* di antara para pihak yang terlibat. *Conflict of interest* terjadi ketika kepentingan atau tujuan dari setiap pihak bertentangan satu sama lain. Sebagai contoh, bayangkan dua perusahaan yang berbeda ingin bekerja sama dalam suatu proyek bisnis. Namun, salah satu perusahaan memiliki hubungan dekat dengan pihak lain yang mungkin dapat memengaruhi keputusan mereka. Hal ini dapat menimbulkan sengketa jika keputusan yang diambil tidak adil atau merugikan pihak lain.

Sengketa bisnis seringkali memerlukan penyelesaian melalui proses hukum atau mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Penting untuk memahami bahwa sengketa bisnis tidak hanya merugikan pihak yang terlibat, tetapi juga dapat berdampak pada reputasi dan keberlanjutan bisnis kedua belah pihak. Oleh karena itu, penyelesaian yang tepat dan adil sangat penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dari itu, dalam penelitian ini. Penulis akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan.

LITERATUR REVIEW

Sengketa bisnis adalah ketika ada perselisihan antara dua pihak dalam dunia bisnis. Perselisihan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti perbedaan pendapat atau kesalahpahaman. Ketika sengketa bisnis terjadi, hal ini bisa mempengaruhi hubungan antara kedua pihak, mengganggu produktivitas kerja, dan bahkan menghambat jalannya bisnis. Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa bisnis adalah melalui arbitrase. Arbitrase adalah proses dimana kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan. Keuntungan dari arbitrase adalah pihak-pihak yang terlibat bisa memilih sendiri guarbiter atau penengah yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Hal ini membuat keputusan yang diambil akan lebih dipercaya dan biasanya lebih cepat daripada melalui pengadilan (Rahmadi Indra Tektona 2011).

Proses sengketa terjadi ketika dua pihak yang memiliki pendapat berbeda tidak bisa mencapai kesepakatan. Misalnya, jika kamu dan temanmu tidak setuju tentang suatu hal, maka bisa terjadi sengketa. Biasanya, orang tidak suka mengungkapkan pendapatnya yang bisa menyebabkan konflik terbuka karena takut menghadapi konsekuensi yang tidak menyenangkan. Misalnya, kamu mungkin akan merasa sulit atau tidak nyaman jika harus menghadapi situasi yang rumit akibat perbedaan pendapat tersebut. Jadi, sengketa terjadi ketika tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih pendapat (Suyud Margono, 2000).

Dampak dari pertumbuhan bisnis yang sangat cepat juga berdampak pada lembaga hukum dan pengadilan yang dianggap kurang profesional dalam menangani perselisihan bisnis. Mereka dianggap tidak independen, bahkan hakim-hakimnya dianggap telah kehilangan integritas moral dalam melaksanakan tugas mereka untuk menegakkan hukum dan keadilan saat menangani, memeriksa, dan mengadili setiap kasus yang diajukan. Pengadilan dianggap sebagai tempat penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan efisien.

Contoh sederhananya adalah ketika ada perselisihan antara dua perusahaan tentang kontrak kerjasama. Jika pengadilan dianggap tidak profesional dan tidak independen, maka penyelesaian kasus tersebut bisa menjadi tidak adil bagi salah satu pihak. Hal ini bisa merugikan pihak yang merasa dirugikan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dapat disimpulkan bahwa penting bagi lembaga hukum dan pengadilan untuk menjaga profesionalisme, independensi, dan integritas moral agar dapat menyelesaikan sengketa bisnis secara adil, efektif, dan efisien (Ariani, 2013).

Dalam proses penyelesaian sengketa, ada dua cara yang biasa dilakukan. Pertama, melalui proses litigasi di pengadilan. Kedua, melalui proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama diluar pengadilan. Proses litigasi di pengadilan seringkali menghasilkan kesepakatan yang bersifat bertentangan dan cenderung menimbulkan masalah baru. Selain itu, proses ini juga lambat dan membutuhkan biaya yang mahal. Akibatnya, hubungan antara pihak yang bersengketa bisa menjadi buruk dan menimbulkan permusuhan.

Sementara itu, proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama di luar pengadilan lebih fokus pada mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Contohnya, mediasi atau negosiasi antara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan kedua cara penyelesaian sengketa ini dan memilih yang terbaik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing pihak yang terlibat (Usman, 2012).

Secara keseluruhan, literatur menyoroti tantangan dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan, dan juga menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan sengketa bisnis baik itu dipengadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kepustakaan, yaitu metode penelitian yang mengandalkan buku-buku dan sumber kepustakaan lainnya sebagai bahan dan data utama (Zed, 2008). Metode ini dipilih karena studi pustaka tidak hanya membantu peneliti dalam menentukan langkah awal dan menyusun kerangka penelitian, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji teori secara lebih mendalam dan memperjelas metodologi yang digunakan. Selain itu, studi pustaka juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh data penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, tidak diperlukan riset lapangan, melainkan cukup dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan yang ada dalam koleksi perpustakaan (Zed, 2008).

Setelah itu, penulis membaca dan menelaah satu per satu bahan tersebut untuk meneliti isinya secara mendalam. Setelah proses pembacaan dan penelaahan selesai, penulis melakukan analisis dan menyusun hasilnya dalam pembahasan penelitian ini, serta mengutip kalimat-kalimat yang sesuai dengan topik penelitian. (Fatkhurakman & Syufaat, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa Bisnis

Sengketa bisnis adalah ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam dunia bisnis. Sengketa ini perlu diselesaikan dengan cepat agar tidak berlarut-larut dan mengganggu kelangsungan usaha. Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa bisnis adalah melalui litigasi, yaitu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam litigasi, sengketa bisnis akan diputuskan oleh hakim yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam menyelesaikan masalah hukum. Hakim akan memeriksa bukti-bukti dan argumen dari kedua

belah pihak untuk kemudian memberikan keputusan yang adil.

Sebagai contoh, jika dua perusahaan tidak setuju tentang kontrak bisnis yang telah disepakati sebelumnya, mereka dapat membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk diselesaikan. Hakim akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan kemudian memberikan keputusan yang mengikat. Dengan demikian, litigasi adalah cara terakhir dalam menyelesaikan sengketa bisnis dan biasanya dilakukan ketika upaya mediasi atau negosiasi tidak berhasil. Itulah mengapa penting untuk memiliki penyelesaian sengketa yang efektif dan cepat agar bisnis dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Sengketa dengan rekanan atau mitra bisnis adalah sesuatu yang dihindari oleh pelaku bisnis karena dapat merusak reputasi mereka dan mengurangi kepercayaan dari klien, nasabah, atau konsumen perusahaan tersebut. Berbeda dengan sengketa lainnya seperti lingkungan dan tenaga kerja, sengketa bisnis biasanya dirahasiakan oleh pelaku bisnisnya. Sengketa bisnis dapat bermacam-macam jenisnya, di antaranya:

1. Sengketa perniagaan: terkait dengan masalah bisnis dan perdagangan.
2. Sengketa perbankan: terkait dengan bank dan lembaga keuangan.
3. Sengketa Keuangan: terkait dengan masalah keuangan dan investasi.
4. Sengketa Penanaman Modal: terkait dengan investasi dan modal usaha.
5. Sengketa Perindustrian: terkait dengan industri dan produksi barang.
6. Sengketa HKI (Hak Kekayaan Intelektual): terkait dengan hak cipta, paten, dan merek.
7. Sengketa Konsumen: terkait dengan hak konsumen dan produk yang dibeli.
8. Sengketa Kontrak: terkait dengan pelanggaran kontrak antara pihak-pihak bisnis.
9. Sengketa pekerjaan dan perburuhan: terkait dengan masalah ketenagakerjaan.
10. Sengketa perusahaan: terkait dengan konflik internal di perusahaan.
11. Sengketa hak: terkait dengan permasalahan hak-hak individu atau kelompok.
12. Sengketa property: terkait dengan kepemilikan properti atau tanah.
13. Sengketa Pembangunan konstruksi: terkait dengan proyek pembangunan dan konstruksi.

Dengan memahami jenis-jenis sengketa bisnis ini, pelaku bisnis dapat lebih waspada dan menghindari konflik yang dapat merugikan bisnis mereka. Konflik dalam bisnis atau perdagangan bisa terjadi sebelum atau setelah perjanjian disepakati. Contohnya, konflik bisa muncul mengenai objek perjanjian, harga barang, isi perjanjian, atau saat perjanjian dilaksanakan. Konflik ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

1. Konflik Data: Terjadi karena kurangnya informasi, kesalahan informasi, perbedaan pandangan, interpretasi data yang berbeda, dan penafsiran prosedural yang berbeda. Data penting dalam kesepakatan, jadi keakuratan data diperlukan untuk kesepakatan yang baik.
2. Konflik Kepentingan: Terjadi karena perasaan bersaing, kepentingan substansi, kepentingan prosedural, dan kepentingan psikologi. Konflik kepentingan bisa muncul jika pihak-pihak merasa memiliki kepentingan yang berbeda, yang bisa mengganggu kerjasama.
3. Konflik Hubungan: Terjadi karena emosi yang kuat, kesalahan persepsi, komunikasi yang buruk, atau tingkah laku negatif berulang. Pihak-pihak yang bekerja sama harus mengendalikan emosi, memperbaiki komunikasi, dan menghilangkan tingkah laku negatif.
4. Konflik Struktur: Terjadi karena pola perilaku yang merusak, kontrol yang tidak seimbang, kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang, kekuasaan, geografi, psikologi, atau faktor lingkungan yang menghambat kerjasama.
5. Konflik Nilai: Terjadi karena perbedaan kriteria evaluasi, pandangan hidup, ideologi, agama, atau penilaian sendiri tanpa memperhatikan orang lain.

Semua konflik ini dapat mempengaruhi kerjasama dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor ini agar konflik

dapat dihindari atau diselesaikan dengan baik. (Joni Emerzon 2002: 503-505)

Dalam kasus sengketa bisnis, seringkali masalah yang dibawa ke Pengadilan berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Contohnya, jika seseorang tidak membayar hutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, maka itu bisa dianggap sebagai wanprestasi.

Di sisi lain, perbuatan melawan hukum terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain dan harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Misalnya, jika seseorang merusak properti milik orang lain tanpa izin, maka dia harus mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Kedua hal ini diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal yang mengatur wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ini memberikan pedoman bagi pengadilan untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, ketika terjadi perselisihan antara pihak-pihak dalam bisnis, hukum akan digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan

Dalam banyak negara di dunia, sistem peradilan seringkali sulit untuk dibentuk dan didesain dengan baik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya dan beragamnya kepentingan yang harus dilindungi oleh sistem tersebut. Terkadang, kepentingan yang satu bertentangan dengan kepentingan yang lain. Misalnya, sistem peradilan harus dapat melindungi kepentingan dari pihak yang mengajukan gugatan, namun sekaligus juga memberikan perlindungan kepada pihak yang digugat atau yang kalah dalam kasus untuk dapat mengajukan banding atau kasasi (Atang Abd Hakim, 2015).

Sistem peradilan yang efektif dan efisien harus mampu menyeimbangkan kepentingan dari semua pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Hal ini dapat menjadi tantangan yang kompleks bagi banyak negara, karena perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengembangan sistem peradilan yang baik memerlukan pemikiran yang matang dan cermat agar dapat memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi melalui pengadilan merupakan langkah terakhir yang diambil ketika pihak-pihak yang terlibat tidak dapat mencapai kesepakatan secara damai. Artinya, jika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah, maka pilihan terakhirnya adalah melalui proses hukum di pengadilan. Sebagai contoh, jika dua perusahaan tidak bisa mencapai kesepakatan dalam sebuah kontrak bisnis dan tidak ada cara lain untuk menyelesaikan perselisihan mereka, maka mereka bisa membawa kasusnya ke pengadilan. Di sana, hakim akan memeriksa bukti-bukti dan argumen dari kedua belah pihak untuk mencari solusi yang adil.

Namun, penting untuk diingat bahwa proses litigasi ini biasanya memakan waktu dan biaya yang cukup besar, jadi sebaiknya mencoba untuk menyelesaikan sengketa secara damai terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melibatkan pengadilan. (Siahaan et al., 2018)

Sebagaimana M. Yahya mengatakan dikatakan bahwa peradilan masih penting sebagai tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan. Artinya, ketika ada masalah atau sengketa, pengadilan adalah tempat di mana kebenaran dan keadilan bisa ditemukan. Peradilan ini berperan penting dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Salah satu alasan mengapa peradilan penting adalah untuk menghindari *eigenrehting*, yang berarti melakukan keadilan dengan cara sendiri tanpa melalui proses hukum yang benar. Dengan menggunakan pengadilan, kita bisa memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum yang berlaku dan proses yang adil.

Peradilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi hanya dapat ditemukan di bawah Mahkamah Agung. Ini berarti bahwa keputusan

yang diambil oleh peradilan ini memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Dengan kata lain adalah peradilan masih menjadi pilihan terbaik untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam menyelesaikan masalah atau sengketa. Dan dengan menggunakan peradilan, kita bisa memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum yang berlaku dan proses yang adil. (Harahap, 2008)

Pengadilan Negeri adalah tempat di mana kasus-kasus hukum seperti kasus pidana dan perdata di Indonesia diproses dan diputuskan. Mereka berwenang untuk menyelesaikan sengketa bisnis, yang merupakan bagian dari kasus perdata, seperti sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri, prosedur mediasi wajib dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam SEMA No. 01 Tahun 2008. Mediasi ini bertujuan untuk mencoba menyelesaikan sengketa dengan cara damai sebelum masuk ke tahap persidangan.

Jika mediasi tidak berhasil, kasus akan masuk ke tahap persidangan biasa. Proses persidangan ini meliputi pembacaan gugatan, jawaban tergugat, pembuktian, hingga akhirnya hakim mengeluarkan keputusan. Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan pengadilan, mereka dapat melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Namun, proses ini bisa memakan waktu dan memperbesar biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Beberapa pelaku ekonomi atau bisnis mungkin memilih untuk menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal. Mereka lebih memilih penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Siahaan et al., 2018)

Litigasi adalah cara untuk menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Jadi, ketika ada konflik antara dua pihak, mereka akan pergi ke pengadilan dan memberikan bukti kepada hakim. Hakim kemudian akan membuat keputusan akhir berdasarkan bukti yang diberikan. Misalnya, jika seseorang menuntut tetangganya karena merusak propertinya, mereka bisa membawa kasus tersebut ke pengadilan. Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan pengadilan, mereka bisa mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Jadi, litigasi adalah cara formal untuk menyelesaikan perselisihan melalui sistem peradilan.

Ada beberapa penjelasan mengenai dua jenis pengadilan yang dapat menyelesaikan sengketa bisnis, yaitu Pengadilan Umum dan Pengadilan Niaga. Pengadilan Umum berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki tugas serta kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Proses di Pengadilan Umum sangat formal, keputusan dibuat oleh hakim, dan para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Keputusan yang diambil bersifat memaksa dan mengikat, serta orientasinya pada fakta hukum.

Sementara itu, Pengadilan Niaga juga berada di lingkungan pengadilan umum, namun merupakan pengadilan khusus yang memiliki tugas untuk menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Proses di Pengadilan Niaga juga sangat formal, keputusan dibuat oleh hakim, para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan, dan keputusan bersifat memaksa dan mengikat. Orientasinya juga pada fakta hukum dan proses persidangan bersifat terbuka.

Dengan demikian, Pengadilan Umum dan Pengadilan Niaga memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis, namun keduanya memiliki karakteristik yang hampir sama dalam hal proses, keputusan, dan orientasi pada fakta hukum.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan adalah cara yang sering digunakan ketika pihak-pihak yang terlibat tidak bisa mencapai kesepakatan melalui negosiasi atau mediasi. Jadi, jika dua perusahaan memiliki konflik dan tidak bisa menyelesaikannya sendiri, mereka bisa membawa masalah mereka ke pengadilan. Di pengadilan, hakim akan mendengarkan argumen dari kedua pihak dan melihat bukti yang mereka berikan. Setelah

hakim membuat keputusan akhir, pihak yang kalah harus mematuhi keputusan tersebut. Ini adalah cara yang resmi untuk menyelesaikan sengketa, dan prosesnya bisa melibatkan berbagai tahapan seperti penyampaian bukti, pendengaran persidangan, dan penilaian hakim. Jadi, pengadilan adalah tempat di mana sengketa bisnis bisa diselesaikan secara adil dan berdasarkan hukum. Pengadilan Negeri adalah bagian dari sistem peradilan yang memiliki tugas dan wewenang untuk menangani kasus-kasus pidana dan perdata di tingkat pertama. Artinya, Pengadilan Negeri adalah tempat di mana kasus-kasus hukum pertama kali diajukan dan diputuskan. Contohnya, jika seseorang melakukan tindak pidana atau memiliki sengketa perdata dengan orang lain, kasus tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diproses dan diputuskan. Sementara itu, Pengadilan Niaga adalah jenis pengadilan khusus yang juga berada dalam lingkungan pengadilan umum. Pengadilan Niaga memiliki tugas dan wewenang khusus yang terkait dengan kasus kepailitan dan penundaan pembayaran. Jadi, jika ada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan tidak bisa membayar hutangnya, kasus tersebut akan ditangani oleh Pengadilan Niaga sesuai dengan Undang-Undang No. 37 tahun 2004. Jadi, intinya Pengadilan Negeri menangani kasus pidana dan perdata secara umum, sedangkan Pengadilan Niaga khusus menangani kasus kepailitan dan penundaan pembayaran.

REFRENSI

- Atang Abd Hakim, Sofyan al-Hakim. (2015). *Kerangka Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah*. AT- TARADHI Jurnal Studi Ekonomi, Volume 6. No 1. hlm. 34
- Fatkhurakman, F., & Syufaat, S. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)(Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). *Jurnal Hukum Ekonomi ...*, 6(2), 129–148.
- Henry Donald. "Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017
- Joni emerson, *Hukum Bisnis Indonesia (2022)*, Palembang: Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan ke delapan, hlm 229
- M. Yahya Harahap, (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Nevey Varida Ariani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Jurnal Hukum, Univeritas Sebelas Maret 2013 hlm.4
- Siahaan, H., Pengadilan, K., Dalam, N., Sengketa, P., & Di, B. (2018). *Hotman Siahaan, Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Halaman 274- 282. 16, 274–282.*
- Rahmat Indra Tektona. (2011). *Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*. *Pendecta Research Law Journal*, Vol. 6. Abstrak
- Racmadi usman (2012) *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Suprapdi Suprapdi. (2023) *Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Laps) Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia*, Mu'amalah: Jurnal HukumEkonomi Syariah.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.